

**ANALISIS PENERAPAN *GOOD GOVERNMENT*
GOVERNANCE DAN SPIP DALAM PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH PADA PENGGUNAAN UTANG
PEMERINTAH KOTA SURABAYA TAHUN 2025**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk
memenuhi salah satu persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
dalam bidang Akuntansi

Disusun Oleh:

Difta Maulia Nasywa

(08030222082)



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

2026

PERNYATAAN

Saya, Difta Maulia Nasywa 08030222084, menyatakan bahwa:

1. Skripsi saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (plagiarism) dari karya orang lain. Skripsi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di UIN Sunan Ampel Surabaya, maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Di dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis skripsi ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di UIN Sunan Ampel Surabaya.

Surabaya, 3 Juli 2024



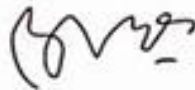
Difta Maulia Nasywa
Nim. 08030222082

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI/MUNAQOSAH

Surabaya, 3 Juni 2026

Skripsi telah selesai dan siap untuk diuji

Dosen Pembimbing,



Dr. Imam Buchori, SE., M.Si

NIP. 196809262000031001

ANALISIS PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE* DAN SPIP DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA PENGGUNAAN UTANG PEMERINTAH KOTA SURABAYA TAHUN 2025

Difta Maulia Nasywa

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 18 Juni 2026 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Tanda Tangan:

1. Dr. Imam Buchori, SE., M.Si.
NIP. 196809262000031001
(Penguji 1)
2. Ade Irma Suryani Lating, M.S.A, CSRS
NIP. 199110012019032020
(Penguji 2)
3. Ajeng Tita Nawangsari, S.E.,M.A.,Ak
NIP. 198708282019032013
(Penguji 3)
4. Mohammad Dliyaul Muflihlin, S.E.I., M.E
NIP. 199401052023211020
(Penguji 4)

Bond

.....

21

6/11/2

Surabaya,
Dekan.



Dr. Snajul Arifin, S.Ag., S.S., M.E.I
NIP. 197005142000031001

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Difta Maulia Nasywa
NIM : 08030222082
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam, Akuntansi
E-mail address : maulianasywadifta@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Analisis Penerapan Good Government Governemnt dan SPIP Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Penggunaan Utang Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2025

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 08 Juli 2026

Penulis

(Difta Maulia Nasywa)

ABSTRAK

Pengelolaan keuangan daerah merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menuntut penerapan prinsip *Good Government Governance* (GGG) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), khususnya pada kebijakan pembiayaan melalui utang daerah. Penggunaan utang Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2025 sebagai alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur menjadi isu strategis karena memerlukan tata kelola yang transparan, akuntabel, serta didukung sistem pengendalian internal yang efektif guna menjaga keberlanjutan fiskal daerah.

Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan *Good Government Governance* dan SPIP dalam pengelolaan keuangan daerah pada penggunaan utang Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2025. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan triangulasi terhadap 37 informan yang terdiri atas unsur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Inspektorat, dan masyarakat. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, serta triangulasi sumber untuk menjamin kredibilitas temuan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, kepatuhan hukum, efektivitas, dan efisiensi serta unsur-unsur SPIP telah dilaksanakan sesuai ketentuan, namun implementasinya belum sepenuhnya optimal. Partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan masih terbatas, komunikasi kebijakan belum berjalan secara maksimal, dan pengendalian berbasis risiko memerlukan penguatan. Realisasi pendapatan daerah mencapai 90,52%, realisasi belanja sebesar 84,02%, sedangkan realisasi pinjaman daerah hanya mencapai 48,80% dari anggaran sebesar Rp452 miliar.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan *Good Government Governance* dan SPIP telah memberikan kontribusi terhadap kualitas pengelolaan keuangan daerah, namun masih terdapat kesenjangan antara kepatuhan administratif dan implementasi substantif. Oleh karena itu, penguatan transparansi, partisipasi publik, komunikasi kebijakan, dan pengendalian berbasis risiko diperlukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam kebijakan penggunaan utang.

Kata Kunci: *Good Government Governance; SPIP; pengelolaan keuangan daerah; utang daerah; tata kelola pemerintahan.*

ABSTRACT

Regional financial management is a fundamental aspect of public administration that requires the effective implementation of Good Government Governance (GGG) principles and the Government Internal Control System (SPIP), particularly in regional debt financing policies. The utilization of regional debt by the Surabaya City Government in 2025 as an alternative source of infrastructure financing has become a strategic issue, as it demands transparent, accountable, and sustainable governance supported by an effective internal control system to ensure fiscal sustainability.

This study aims to analyze the implementation of Good Government Governance and the Government Internal Control System (SPIP) in regional financial management concerning the utilization of regional debt by the Surabaya City Government in 2025. A qualitative approach employing a case study design was adopted. Data were collected through interviews, documentation, and triangulation involving 37 informants representing the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD), the Inspectorate, and the community. Data were analyzed using data reduction, data display, conclusion drawing, and source triangulation to ensure the credibility of the findings.

The findings indicate that the principles of transparency, accountability, compliance with regulations, effectiveness, and efficiency, together with the components of SPIP, have been formally implemented in accordance with applicable regulations. However, their implementation has not yet reached an optimal substantive level. Public participation in policy formulation remains limited, policy communication requires further improvement, and risk-based internal control needs to be strengthened. Regional revenue realization reached 90.52%, expenditure realization amounted to 84.02%, while regional borrowing realization accounted for only 48.80% of the planned IDR 452 billion.

This study concludes that the implementation of Good Government Governance and SPIP has contributed to improving the quality of regional financial management; however, a gap remains between administrative compliance and substantive implementation. Therefore, strengthening transparency, public participation, policy communication, and risk-based internal control is essential to enhance the quality of regional financial management, particularly in the implementation of regional debt policies.

Keywords: *Good Government Governance; SPIP; regional financial management; regional debt; governance gap.*

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI/MUNAQOSAH.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
LEMBAR PERNYATAAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT	xiii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I.....	20
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	20
1.2 Rumusan Masalah	42
1.3 Tujuan Penelitian.....	42
1.4 Manfaat Penelitian.....	43
BAB II	47
2.1 <i>Good government governance</i>	47
2.2 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).....	50
2.3 Pengelolaan Keuangan Daerah	54
2.4 Penelitian Terdahulu.....	56
2.5 Kerangka Berpikir	62
BAB III.....	66
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	66
3.2 Waktu dan Lokasi Penelitian.....	66
3.3 Sumber Data dan Penentuan Informan Penelitian.....	67
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	69
3.5 Teknik Analisis Data dan Instrumen Penelitian.....	71
BAB IV	76

4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian	76
4.1.1	Profil Pemerintah Kota Surabaya	76
4.1.2	Perangkat Daerah Terkait (BPKAD & Inspektorat).....	76
4.1.3	Konteks Penggunaan Utang Daerah Tahun 2025.....	77
4.2	Hasil dan Pola Umum Temuan Lapangan	81
4.2.1	Profil Informan Penelitian.....	81
4.2.2	Pelaksanaan dan Hasil Pengumpulan Data Wawancara	84
4.2.3	Hasil Coding dan Pengembangan Tema	86
4.2.4	Hasil Coding dan Pengembangan Tema	86
4.2.5	Pola Umum Temuan Berdasarkan Triangulasi	90
4.3	Integrasi Good Government Governance dan SPIP dalam Pengelolaan Keuangan Daerah pada Penggunaan Utang.....	115
4.3.1	Posisi GGG sebagai Rumah dan SPIP sebagai Kamar Pengendalian	115
4.3.2	Transparansi Substantif dan Informasi-Komunikasi SPIP	116
4.3.3	Akuntabilitas, Lingkungan Pengendalian, dan Pertanggungjawaban Manfaat	118
4.3.4	Partisipasi, Responsivitas, Monitoring, dan Tindak Lanjut	119
4.3.5	Kepatuhan Hukum, Kegiatan Pengendalian, dan Audit Trail.....	121
4.3.6	Efektivitas, Efisiensi, Penilaian Risiko, dan Manfaat Publik	122
4.4	Penguatan SPIP di Dalam Rumah GGG: Pengawasan, Risiko, dan Pemantauan	124
4.5	Keterkaitan Integratif GGG-SPIP dengan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	126
4.5.1	Konsistensi Perencanaan, Realisasi, dan Pertanggungjawaban Penggunaan Utang Daerah.....	126
4.5.2	Efektivitas, Efisiensi, dan Manfaat Penggunaan Utang Daerah.....	128
4.5.3	Risiko Fiskal, Pengendalian, dan Kepercayaan Publik dalam Pengelolaan Utang Daerah.....	129
4.6	Analisis dan Pembahasan.....	130
4.6.1	Analisis Integratif GGG-SPIP pada Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi, Responsivitas, dan Keadilan Distribusi	135

4.6.2	Analisis Integratif GGG-SPIP pada Risiko Fiskal, Pengendalian Internal, dan Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah.....	143
4.6.3	Analisis Keterkaitan <i>Good government governance</i> dan SPIP dengan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Kasus Penyimpangan Penggunaan Utang.....	150
BAB V		159
5.1	Kesimpulan	159
5.2	Saran	160
DAFTAR PUSTAKA		161
LAMPIRAN		170
A.	Lampiran 1. Data APBD Murni, realisasi APBD Januari s.d Desember 2025	170
B.	Lampiran 2. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD Kota Surabaya Tahun 2025	182
C.	Lampiran 3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Kota Surabaya Tahun 2025	185
D.	Lampiran 4. Rekapitulasi Realisasi Belanja Daerah Th 2023 dan Alokasi Belanja Daerah pada Th 2024 serta Proyeksi Th 2025 ..	187
E.	Lampiran 5. Data LHKP 2024 & Bukti LHKP 2025 (audited)...	188
F.	Lampiran 6. Grafik LPKD Surabaya dari tahun ke tahun.....	199
G.	Lampiran 7. Ikhtisar Kepatuhan LHKPN Pemerintah Surabaya 2025	200

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Penelitian	63
Gambar 3.1 Diagram Teknik analisa data.....	72
Gambar 4.1 Keterkaitan <i>Good government governance</i> dan SPIP terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Pengelolaan Utang Daerah.	134



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Sekilas Rangkuman Penelitian Terdahulu.	57
Tabel 3.1 Kriteria dan Komposisi Informan Penelitian	68
Tabel 4.1 Realisasi APBD Kota Surabaya s.d Desember 2025	78
Tabel 4.2 Realisasi Pendapatan Daerah Bulanan Tahun 2025	80
Tabel 4.3 Realisasi Belanja Daerah Bulanan Tahun 2025	80
Tabel 4.4 Kode Informan Penelitian	81
Tabel 4.5 Komposisi Informan Penelitian	82
Tabel 4.6 Identitas Informan Penelitian	82
Tabel 4.7 Pelaksanaan Wawancara & Topik Informan Penelitian	85
Tabel 4.8 Ringkasan Hasil Coding Penelitian	87
Tabel 4.9 Pengembangan Tema Berdasarkan Coding Kualitatif	87
Tabel 4.10 Frekuensi Kode Dominan	88
Tabel 4.11 Respon Informan BPKAD, Inspektorat, dan Masyarakat	91
Tabel 4.12 Pola Umum Temuan Berdasarkan Triangulasi Sumber	110
Tabel 4.13 Pola Umum Temuan Berdasarkan Triangulasi Teknik	113
Tabel 4.14 Integrasi Prinsip GGG dan Unsur SPIP	115
Tabel 4.15 Alur Analisis Miles, Huberman, dan Saldana	131
Tabel 4.16 Matrix Display Integrasi GGG dan SPIP dalam Pengelolaan Utang Daerah	132
Tabel 4.17 Matrix Display Integratif GGG-SPIP pada Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi, Responsivitas, dan Keadilan Distribusi	136
Tabel 4.18 Evidence Matrix Integratif GGG-SPIP pada Tata Kelola Substantif	139
Tabel 4.19 Hubungan Temuan Integratif pada Tata Kelola Substantif	140
Tabel 4.20 Ringkasan Temuan	141
Tabel 4.21 Matrix Display Integratif GGG-SPIP pada Risiko Fiskal, Pengendalian Internal, dan Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah	143
Tabel 4.22 Evidence Matrix Integratif GGG-SPIP pada Risiko, Pengendalian, dan Siklus Keuangan Daerah	147

Tabel 4.23 Hubungan Temuan Integratif pada Risiko, Pengendalian, dan Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah.....	148
Tabel 4.24 Sintesis Temuan Integratif GGG-SPIP Berdasarkan Selective Coding	150
Tabel 4.25 Proposisi Konseptual Penelitian.....	153



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulahadi, D. (2025). *Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Berbasis Keadilan Sosial*. Universitas Islam Indonesia.
- Alzoubi, A. B. (2025). Maximizing internal control effectiveness: the synergy between forensic accounting and corporate governance. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 23(1), 404–416.
- Ana, C., Gonz, E., & Ventura, J. (2017). *How Does Good Governance Relate to Quality of Life ? 1*, 1–16. <https://doi.org/10.3390/su9040631>
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2021). *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)*.
- Bandura, A. (1986). *Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive Theory*. Prentice Hall.
- Boufounou, P., Eriotis, N., Kounadeas, T., Argyropoulos, P., & Pouloupoulos, J. (2024). *Enhancing Internal Control Mechanisms in Local Government Organizations : A Crucial Step towards Mitigating Corruption and Ensuring Economic Development*.
- Budiharjo, R., Pratomo, D., & Hapsari, D. W. (2025). Local Government Financial Performance: Good Governance, the Effectiveness Internal Control and Competence. *JMKSP (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, Dan Supervisi Pendidikan)*, 10(1), 125–138.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications.
https://books.google.co.id/books?id=4uB76IC_pOQC
- Davis, F. D. (1989). Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319–340.
- Djumyati, L., & Susilawati, S. (2025). *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern , Kompetensi Sumber Daya Manusia , dan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. 14(3), 451–463.
- Dokkum, H. P. Van, Loeber, A. M. C., & Grin, J. (2023). Understanding the role

of government in sustainability transitions : A conceptual lens to analyse the Dutch gas quake case. *Technological Forecasting & Social Change*, 194(September 2021), 122685.

<https://doi.org/10.1016/j.techfore.2023.122685>

Dr. Herie Saksono, M. S., Kartika Aprilia Ivani, S. E. M. M., Hamidah, S. E. M. A., Drs. Supriadi, M. S., Ira Sahara, M. A., Eki Tiyas Nurulia, M. E., Widyaningsih Azizah, S. E. A. M. S. C. A., Sakti Muda Nasution, S. E. M. S., Hevi Susanti, S. E. M. S., & Lavenia Indanus Pratiwi, S. E. M. S. A. (2024). *Pengantar Akuntansi*. Cendikia Mulia Mandiri.

FAIZAL, M. (2025). *ANALISIS PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN` KEUANGAN DAERAH PADA KANTOR BPKPD KABUPATEN PINRANG (PERSPEKTIF AKUNTANSI SYARIAH)*.

Fikr, M. (n.d.). *Utang Rp452 M Pemkot Surabaya Jadi Bancakan, Bukan Infrastruktur*. Retrieved March 4, 2026, from <https://mauli.id/2025/08/24/utang-rp452-m-pemkot-surabaya-jadi-bancakan-bukan-infrastruktur/>

Fikri, A. (2024). *Pengaruh Financial Self-Efficacy, Locus of Control, Gaya Hidup, dan Literasi Keuangan Syariah terhadap Pengelolaan Keuangan Pribadi pada Generasi Z di D.I. Yogyakarta*.

G., U. S. (2019). *Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Good Government Governance (Studi pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Pekanbaru)*.

Ghasemi, M., Musongong, A., Marie, N., & Rokni, L. (2022). *The Necessity of Governance Thorough Internal Control and Accountability in NGOs : A Case of Buea Sub-Division Cameroon*.

Hadi, S. (2016). Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 22(1), 76.

Harrison, T. M., & Sayogo, D. S. (2014). Transparency, participation, and accountability practices in open government: A comparative study. *Government Information Quarterly*, 31(4), 513–525.

<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.giq.2014.08.002>

- Hartanto, D., Dalle, J., Akrim, A., & Anisah, H. U. (2021). *Perceived effectiveness of e-governance as an underlying mechanism between good governance and public trust : a case of Indonesia*. 23(6), 598–616.
<https://doi.org/10.1108/DPRG-03-2021-0046>
- I.M., N. (2025). *METODOLOGI PENELITIAN BISNIS - Peran Filsafat, Teknologi, dan Etika*. Airlangga University Press.
<https://books.google.co.id/books?id=X9J4EQAAQBAJ>
- Indonesia, P. R. (2008). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*.
- Indriana, I., & Nasrun, M. (2019). Pengaruh Good Governance Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan. *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 8(1).
- Jatmiko, B., Haya, B. S., & Utami, T. P. (2022). Enhancing value for money performance in local government organizations: The role of public financial accountability and internal control. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 12(2), 245–259.
- Kerja, R., Daerah, P., & Surabaya, K. (2025). *peraturan walikota surabaya nomor 52 tahun 2024*.
- KEUANGAN, D. J. P., KEUANGAN, K., & INDONESIA, R. (n.d.-a). *Data APBD Kota Surabaya Murni, realisasi APBD s.d Maret 2025, - data diterima SIKD per 28 Maret 2026 (data Februari 2025)*.
<https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd?periode=3&tahun=2025&provisi=13&pemda=37>
- KEUANGAN, D. J. P., KEUANGAN, K., & INDONESIA, R. (n.d.-b). *Data APBD Kota Surabaya Murni, realisasi APBD s.d Maret 2025, - data diterima SIKD per 28 Maret 2026 (data januari 2025)*.
<https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd?periode=3&tahun=2025&provisi=13&pemda=37>
- Klusáček, P., Alexandrescu, F., Osman, R., Malý, J., Kunc, J., Dvořák, P., Frantál, B., Havlíček, M., Krejčí, T., Martinát, S., Skokanová, H., & Trojan, J. (2018). Good governance as a strategic choice in brownfield regeneration:

- Regional dynamics from the Czech Republic. *Land Use Policy*, 73, 29–39.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2018.01.007>
- Kota, P. W. (2025). *PERUBAHAN Peraturan wali kota surabaya nomor 23 tahun 2025, Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah tahun 2025*.
- Latan, H., & Temalagi, S. (2014). *Analisis Multivariate Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program IBM SPSS 20.0*. Penerbit Alfabeta.
- Lating, N. A. I. S., & Mohammad Dliyaul Muflihini. (2022). Refleksi Standar Akuntansi Pemerintah dalam Manifestasi Good Governance. *Akuntansi: Jurnal Akuntansi Integratif*, 8(2).
<https://doi.org/https://doi.org/10.29080/jai.v8i2.1068>
- Liu, L. (2004). *The Technology Acceptance Model : A Meta-Analysis of Empirical Findings*.
- Lukito, P. (2014). *Akuntabilitas Publik*. Rajawali Pers.
- Maduta, S. R. W. (2025). *Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), Komite Sekolah, dan Akuntabilitas terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) se-Kecamatan Krembangan Kota Surabaya*.
- Mahmudi. (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. ANDI.
- Milasari, A., & Eny Maryanti. (2024). Profitabilitas, Financial Leverage, Dan Cash Holding Terhadap Perataan Laba Dengan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Integratif*, 10(2), 17–39.
- Miles, Matthew B., dan A. M. H. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (p. 354). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
<https://vivauniversity.wordpress.com/wp-content/uploads/2013/11/milesandhuberman1994.pdf>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis*. SAGE Publications. <https://books.google.co.id/books?id=3CNrUbTu6CsC>
- Moenek, R., & Suwanda, D. (2019). *Good Governance Pengelolaan Keuangan Daerah*. PT Remaja Rosdakarya.

- Munawaroh, M. (2022). *Pengaruh Penerapan Good Governance Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Jember*.
- Nasution, D. A. D., Erlina, E., Muda, I., & Yahya, I. (2024). Testing The Mediation Role of Public Service Quality in The Relationship Between Internal Control Implementation and Good Government Governance of The Regional Government of North Sumatra Using SEM-PLS. *Proceeding of International Conference on Education, Society and Humanity*, 2(1), 1601–1609.
- Nawangsari, A. T. (2020). Faktor Penentu Pemahaman Mahasiswa Akuntansi Era Covid19 (Studi Empiris Mahasiswa Akuntansi Di Jawa Timur). *AKUNTANSI : Jurnal Akuntansi Integratif*, 6(2), 71–86.
- Nawangsari, A. T., mohammad ilyas junjuna, & imam buchori. (2021). Pengungkapan Corporate Social Responsibility Selama Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 21(2), 211–227.
- P.D.M.M.B.A.A., C. A. (2021). *Akuntansi Sektor Publik - Edisi Terbaru*. Andi Offset.
- Pakawaru, M. I. (2024). *Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Infomasi Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel Moderasi (Survei Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Palu)*. 6, 1063–1073. <https://doi.org/10.11594/untad.jan.6.1.20607>
- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative Research & Evaluation Methods*. SAGE Publications. <https://books.google.co.id/books?id=FjBw2oi8El4C>
- PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 9 TAHUN 2024, 1 (2025).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (2020).
- PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, 1 (2024).

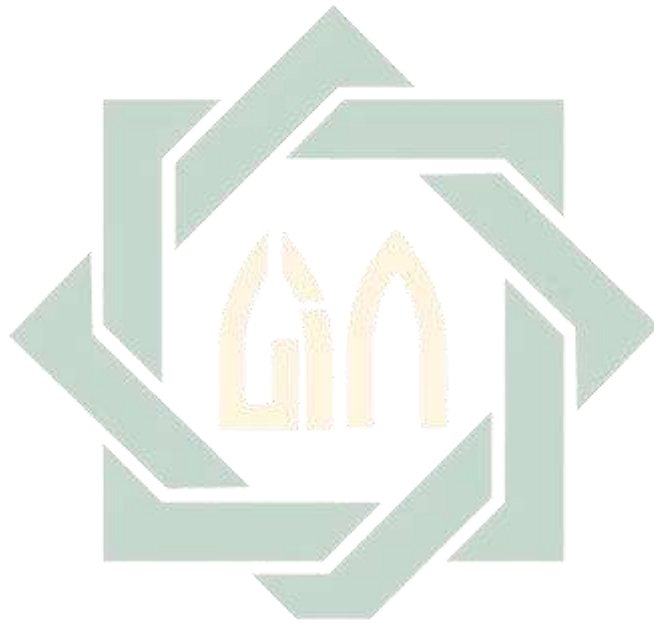
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (2014).
- PERATURAN WALI KOTA SURABAYA NOMOR 23 TAHUN 2025, 1 (2025).
- PERATURAN WALI KOTA SURABAYA NOMOR 25 TAHUN 2025 (2025).
- Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 46 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 98 Tahun 2022 Tentang Pengendalian Kecurangan Dilingkungan Pemerintah Kota Surabaya (2025).
- Putri, A. M., & Rahayu, N. I. (2026). *Determinants of Government Agency Accountability in Rokan Hilir*. 12(1), 164–179.
<https://doi.org/10.29080/jai.v12i1.2499>
- PUTRI, N. V. (2025). *Analisis pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri no 20 tahun 2018 pada Nagari Rambatan, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar*.
- Qhofifah, N., & Rahmawati, M. I. (2025). Pengaruh Good Government Governance Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 14(11).
- Rahayu, I. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Good Governance Terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Empat Lawang. *Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Akuntansi. Universitas Muhammadiyah Palembang. Palembang*.
- Rahman, K. G., & Rachman, S. H. (2021). Pengaruh penerapan good governance dan pengendalian internal terhadap kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah di Kota Makassar. *Jurnal Equilibrium*, 2(1), 25–31.
- Rasuli, P. M. (n.d.). *KEUANGAN DAERAH DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP PENERAPAN GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE (Studi Kasus pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru)*. 4207–4221.
- Rizkianti, N. (2024). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pengendalian Intern dan Good Government Governance terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah dengan Sistem Informasi Akuntansi sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus pada OPD Kabupaten Kepulauan Meranti)*.

- Rosalinda, A., Aulia, F., Syifa, M. H., Hadawiyah, S. R., & Viani, V. (2025). The Role of Public Sector Accounting in Realizing Accountability and Transparency in Local Government Financial Management: A Case Study of the Jakarta Provincial Government. *International Journal of Asian Business and Development*, 1(3), 157–168.
- Sari, D. P. (2021). *ANALISIS PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN*.
- Sedarmayanti. (2007). *Good governance (kepemerintahan yang baik) dalam rangka otonomi daerah: Good governance (Kepemerintahan yang baik) dan good corporate governance (tata kelola perusahaan yang baik)*. Mandar Maju.
- Semarang.com. (2025). *Pemkot Surabaya Nunggak Ratusan Miliar Rupiah ke Kontraktor, Ketua Komisi C DPRD Angkat Bicara*.
<https://lenterasemarang.com/post/item/213688/Pemkot-Surabaya-Nunggak-Ratusan-Miliar-Rupiah-ke-Kontraktor-Ketua-Komisi-C-DPRD-Angkat-Bicara>
- Shidqi, F., & Arfiansyah, Z. (2025). Good governance and corruption in local governments: The role of internal control and audit. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*.
- Sugiyono. (2013a). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. PT. Alfabeta.
- Sugiyono. (2013b). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF DAN R & D*.
- Sugiyono. (2013c). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF KUALITATIF DAN R&D*.
- Surabaya, R. P. J. M. D. (RPJMD) K. (2021). *gambaran umum kondisi daerah surabaya*.
- Suriadi, H. (2025). Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia: Kajian teoretis atas prinsip, tantangan dan strategi implementasi. *Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi Dan Pendidikan*, 1(1), 42–54.
- SUSANTO. (2018). *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja*

Pemerintah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Belopakabupaten Luwu.

- Susilo, A. A., Zarkasyi, M. W., Effendi, N., & Soemantri, R. (2021). The Influence of the Effectiveness of Internal Control and Implementation of the Good Government Governance on Accounting Information Quality: A Case Study in Indonesian Local Government. *J. Legal Ethical & Regul. Isses*, 24, 1.
- Thanh, B., Obaitor, O. S., Grobusch, L. C., Sett, D., Hagenlocher, M., Schinkel, U., Khanh, L., Nguyen, H., Bachofer, F., Thanh, S., & Garschagen, M. (2025). Enablers and barriers to implementing effective disaster risk management according to good governance principles : Lessons from Central Vietnam. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 120(January), 105344. <https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2025.105344>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (2022).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.* (2004).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.* (2014).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, No. 1 (1999).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.* (1999).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (2002).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (1999).
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, 2 (2014).

- Zaitul, Z., Ilona, D., & Novianti, N. (2023). Good Governance in Rural Local Administration. *Administrative Sciences*, 1–19.
- Zou, Q., Mao, Z., Yan, R., Liu, S., & Duan, Z. (2023). Vision and reality of e-government for governance improvement : Evidence from global cross-country panel data. *Technological Forecasting & Social Change*, 194(February), 122667. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2023.122667>



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A